

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Desember 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BAGUS PRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 1035844

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.541.600.000**

1. Tanah Seluas 672 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI  
Rp. 480.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/200 m2 di KAB / KOTA  
KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.061.600.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **50.000.000**

1. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI  
Rp. 8.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SPD MOTOR SOLO Tahun 2004, HASIL  
SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
9.000.000
4. MOTOR, HONDA L1F02N37L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI  
Rp. 13.000.000
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.  
10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **----****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **13.000.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **1.604.600.000**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.604.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.